**PERAN SOSIALISASI PERPAJAKAN MEMODERASI PENGARUH SANKSI
ADMINISTRASI, MODERNISASI SISTEM DAN PENERAPAN E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK
PADA KPP MADYA SEMARANG**

¹⁾Ayu Ramadika Prihani, ²⁾ Sunarto

^{1,2} Program Studi Magister Manajemen, Universitas Stikubank, Indonesia

E-mail: ayuramadika0062@mhs.unisbank.ac.id

Abstract

KPP Madya Semarang was the site of this study, and the data used to pick the objects was that there are still taxpayers who have not filed their annual tax returns for the 2018–2023 tax year. This delay may be a sign of widespread noncompliance with tax laws. Additional issues, like more frequent tax audits or tax law enforcement, may result from this. This study's goal is to examine how tax socialization functions as a moderator of the effects of tax administration sanctions, system modernization, and e-filing on taxpayers' formal compliance at KPP Madya Semarang. 135 respondents, or KPP Madya Semarang taxpayers, who represented the complete population—that is, all KPP Madya Semarang taxpayers—made up the research sample. Purposive sampling, which is a selection approach based on consideration, is used in this instance to select taxpayers who have not filed their annual tax returns during the reporting period and who have applied for an extension of the deadline. Multiple linear regression with moderation variables is the method used by the analysis tool. According to the findings, socialization, e-filing, and administrative punishments all have an impact on taxpayers' formal compliance. Additionally, modernity of the administrative system has little effect on taxpayers' formal compliance, and tax socialization has no moderating effect on this effect.

Keywords: *Employees e-filing systems, formal compliance of taxpayers tax administration sanctions, modernization of administrative systems, and taxation tax socialization*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara terdiri dari pajak dan bukan pajak. Pajak bertanggung jawab atas pembiayaan negara, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Pajak yang dihimpun oleh masyarakat Indonesia dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu adalah salah satu dari berbagai strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menggambarkan kepatuhan perpajakan dengan menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan tepat waktu (Indrasari dkk, 2020) Dalam membangun suatu negara, diperlukan penerimaan negara yang cukup besar. Di Indonesia, Belanja Negara dalam APBN 2024 sebesar Rp3.325 triliun yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun (kontribusi 69,5%), Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp492 triliun (kontribusi 14,8%), Hibah sebesar Rp0,4 triliun (kontribusi 0,01%), dan Pembiayaan sebesar Rp522,8 triliun (kontribusi 15,72%). Agar kontribusi penerimaan pajak cukup besar, diperlukan realisasi penerimaan pajak yang memadai sehingga pemerintah menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi realisasi penerimaan pajak yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Salah satu cara wajib pajak dinilai patuh adalah melalui kepatuhan formal wajib pajak, menurut Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan, kepatuhan formal atau administratif merupakan standar untuk kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan prosedural dan administratif perpajakan, seperti kewajiban penyampaian dan batas waktu penyampaian dan pembayaran pajak. Kepatuhan merupakan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. sementara kepatuhan pajak berdasarkan (Ainiyah & Febriani, 2023) merupakan upaya wajib pajak untuk membayar pajak dan menyampaikan SPT untuk masa pajak bulanan dan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan seluruh hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak adalah denda administratif, yaitu denda atas ketidakpatuhan atau konsekuensi dari ketidakpatuhan dan pengabaian terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat menjadi alasan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar sanksi perpajakan yang tinggi. Namun, ketika pengenaannya rendah, biasanya diabaikan (Ainiyah & Febriani, 2023). Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan saat ini lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih efisien. Selain membuatnya lebih mudah, ini akan mendorong orang untuk membayar pajak (Ainiyah & Febriani, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak tengah menggodok Coretax pada tahun 2024, dan akan mulai berlaku pada bulan Januari 2025. Sistem administrasi layanan Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak memudahkan pengguna dan wajib pajak. Memperbarui kerangka administrasi pajak yang ada adalah tujuan utama pembuatan Coretax. Ini mencakup pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan penagihan pajak, dan menyatukan semua operasi bisnis penting yang terlibat dalam administrasi pajak. Saat penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2024, Coretax tersedia sebagai prototipe. Pelaporan pengembalian pajak (SPT) yang dilakukan secara elektronik merupakan komponen ketiga yang memengaruhi kepatuhan formal wajib pajak. Wajib pajak dianggap patuh pajak ketika mereka memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dan memanfaatkan hak pajaknya. Pada akhirnya, diharapkan bahwa banyaknya keuntungan dari layanan E-Filing akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Safira Aksara, 2021)

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, yaitu cara Direktorat Jenderal Pajak mendidik, mencerahkan, dan mengajarkan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang relevan. Media arus utama cetak, elektronik, dan komunikasi mendukung sosialisasi ini. Sosialisasi perpajakan dipilih sebagai variabel moderasi karena dapat memengaruhi kepatuhan atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Studi ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki potensi untuk mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak dan dapat membantu memperjelas hubungan tersebut dengan mengurangi faktor-faktor yang memengaruhi hubungan tersebut. Hal ini karena sosialisasi perpajakan dapat membantu mengurangi ambiguitas atau ketidakpastian terkait peraturan perpajakan (Safitri & Silalahi, 2020)

Kanwil DJP Jawa Tengah I pada umumnya dan KPP Madya Semarang pada khususnya memiliki hubungan yang bertolak belakang antara realisasi penerimaan pajak dengan kepatuhan formal wajib pajak yang menjadi salah satu fenomena atau permasalahan yang

muncul dalam objek penelitian ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Tengah I pada tahun 2023 sebesar Rp36,08 triliun atau meningkat 10,73% dan 102,5% dari rencana target. Seluruh KPP pada Kanwil DJP Jawa Tengah I pada Direktorat Jenderal Pajak melampaui targetnya lebih dari 100%. Namun berdasarkan pemetaan kuadran terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang keberadaannya berbeda-beda dan KPP Semarang Madya berada pada Kuadran 2 (hanya 1 KPP) yaitu capaian di atas nasional dengan pertumbuhan di bawah nasional.

Selain realisasi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak pada Kanwil DJP Jawa Tengah I tahun 2023 terealisasi sebesar 104,94 persen dari total wajib pajak SPT tahunan sebanyak 54.152. Wajib pajak yang menyampaikan SPT dan KPP Madya Semarang terealisasi 100,34 persen. Namun dari realisasi pelaporan SPT Tahunan yang telah dipaparkan, masih banyak wajib pajak yang terlambat atau belum menyampaikan SPT Tahunannya.

Penelitian ini akan menggunakan KPP Madya Semarang sebagai target kajiannya. Di kantor wilayah, KPP Madya merupakan KPP yang melayani wajib pajak orang pribadi dan beberapa wajib pajak badan besar. KPP Madya melayani wajib pajak di wilayah kabupaten/kota yang berpenghasilan besar. Untuk menetapkan standar dan/atau menyeleksi wajib pajak yang dikelola oleh KPP Madya, Direktorat Jenderal Pajak membagi sektor-sektor tersebut. Meskipun demikian, kantor layanan pajak ini memiliki kendala dalam hal kepatuhan wajib pajak secara resmi sebagai KPP Madya. Hal ini menunjukkan masih terdapat wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, yaitu tahun pajak 2018 (dilaporkan tahun 2019). Wajib pajak yang terlambat melapor pada tahun pajak 2019 sebanyak 269 wajib pajak, pada tahun pajak 2020 sebanyak 212 wajib pajak yang terlambat melapor, pada tahun pajak 2021 sebanyak 1 wajib pajak yang terlambat melapor, pada tahun pajak 2022 sebanyak 220 wajib pajak yang terlambat melapor. Pada tahun pajak 2023 (dilaporkan tahun 2024) sebanyak 13 wajib pajak yang terlambat melapor. Selama dua tahun pajak terakhir (tahun pajak 2022 dan 2023), wajib pajak yang memanfaatkan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan sebanyak 90 dan 76 wajib pajak atau sekitar 44 persen dari total wajib pajak yang terlambat melapor. Wajib pajak yang terbiasa terlambat melapor cenderung akan melanggar kewajiban perpajakan lainnya. Keterlambatan ini dapat menjadi indikator rendahnya kepatuhan terhadap sistem perpajakan secara umum. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang lebih banyak, seperti seringnya dilakukan pemeriksaan pajak atau penegakan hukum. Hal inilah yang menjadi alasan dipilihnya objek penelitian di KPP Madya Semarang.

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat pula fenomena kesenjangan hasil penelitian (research gap) dari sejumlah penelitian terdahulu. Temuan penelitian oleh (Erica, 2021) ; (Indah & Setiawan, 2020) ; (Ainiyah & Febriani, 2023) menunjukkan bahwa sanksi administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Novita et al., 2024) ; (Octaviana & Halimatusadiah, 2023) ; (Rosyida, 2018), dan (Hartana & Merkusiwati, 2018) , sanksi administrasi memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian (Ainiyah & Febriani, 2023) modernisasi sistem administrasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Safira Aksara, 2021) modernisasi sistem tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Freddy, 2014) dan (Malik et al., 2023) mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. “Peran Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Administratif, Modernisasi Sistem dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Formal Wajib

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang ” merupakan judul penelitian yang penulis lakukan karena adanya fenomena yang terjadi pada objek penelitian dan adanya research gap yang telah disebutkan di atas.

2. METODE PENELITIAN

a. Populasi dan Sampel

Setiap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang adalah subjek penelitian ini. Purposive sampling adalah pendekatan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah pendekatan pengambilan sampel yang berfokus pada tujuan tertentu daripada faktor acak, geografis, atau strata (Suharsimi, 2010). Sampel penelitian terdiri dari 135 responden atau wajib pajak di KPP Madya Semarang yang mengajukan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, belum menyampaikan SPT Tahunan, atau menyampaikan SPT Tahunan terlambat pada tahun pajak 2023. (Ghozali, 2016).

b. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang berarti data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Jenis data ini diperoleh dari kuesioner yang diberikan oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Persamaan regresi

Itu regresi persamaan adalah berasal dari dari pengolahan data hasil : $Y = 0,259 X_1 - 0,016 X_2 + 0,569$. Dengan regresi koefisien sebesar 0,569, persamaan menunjukkan itu penggunaan elektronik pengarsipan memiliki dampak yang lebih menguntungkan dan signifikan dampak tentang wajib pajak formal kepatuhan. Dengan regresi koefisien 0,446, pajak sosialisasi adalah itu Kedua paling faktor penting yang mempengaruhi wajib pajak formal kepatuhan. Itu moderat itu adopsi elektronik pengarsipan. Dengan regresi koefisien 0,410, pajak sosialisasi adalah itu ketiga komponen. Dengan regresi koefisien 0,272, pajak sosialisasi adalah itu Faktor keempat yaitu meningkat itu dampak tentang wajib pajak formal kepatuhan, yang pada gilirannya moderat administratif sanksi. Dengan regresi koefisien 0,259, administrasi hukuman peringkat sebagai Faktor kelima yang mempengaruhi wajib pajak formal kepatuhan. Pada saat yang sama, modernisasi bahasa inggris administratif sistem memiliki regresi koefisien -0,016, yang adalah itu pelemahan dampak wajib pajak formal kepatuhan, dan moderasi pajak sosialisasi pada itu modernisasi bahasa inggris administratif sistem memiliki regresi koefisien -0,014.

b. uji t

1. Pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Dengan koefisien beta baku sebesar 0,259, hasil pengolahan data statistik menunjukkan nilai t sebesar 2,668 dan nilai probabilitas sebesar $0,009 < \alpha = 5\% (0,05)$, yang menunjukkan bahwa Sanksi Administratif (X_1) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Administratif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

2. Dampak Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal

Dengan koefisien beta standar sebesar -0,016, hasil pengolahan data statistik menunjukkan nilai t sebesar -0,251 dan nilai probabilitas sebesar $0,802 > \alpha = 5\% (0,05)$, yang menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi (X_2) secara individual tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal

- (Y). Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Formal dipengaruhi secara positif oleh Modernisasi Sistem Administrasi terbantahkan.
3. Dampak Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak
 Dengan koefisien beta standar sebesar 0,569, hasil pengolahan data statistik menunjukkan nilai t sebesar 6,155 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < \text{ taraf signifikansi } [\alpha] = 5\% (0,05)$, yang menunjukkan bahwa penerapan e-filing (X3) secara parsial (individual) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak (Y). Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak diterima.
 4. Bagaimana Pajak Sosialisasi Mempengaruhi Resmi Pembayar pajak Kepatuhan
 Dengan koefisien beta standar sebesar 0,410, pengolahan data statistik hasil menunjukkan nilai t sebesar 8,067 dan probabilitas nilai $0,000 < \text{ signifikansi tingkat } [\alpha] = 5\% (0,05)$, menunjukkan itu di sana adalah parsial (individual) positif dan signifikan pengaruh di antara Pajak Sosialisasi (Z) dan Wajib Pajak Formal Kepatuhan (Y) keempat hipotesa adalah dengan demikian diterima, menurut ke yang Pajak Sosialisasi mempunyai dampak yang baik pada Kepatuhan Formal Wajib Pajak.
 5. Bagaimana Pajak Sosialisasi Mempengaruhi Resmi Pembayar pajak Kepatuhan
 Dengan koefisien beta standar sebesar 0,410, pengolahan data statistik hasil menunjukkan nilai t sebesar 8,067 dan probabilitas nilai $0,000 < \text{ signifikansi tingkat } [\alpha] = 5\% (0,05)$, menunjukkan itu di sana adalah parsial (individual) positif dan signifikan pengaruh di antara Pajak Sosialisasi (Z) dan Wajib Pajak Formal Kepatuhan (Y) keempat hipotesa adalah dengan demikian diterima, menurut ke yang Pajak Sosialisasi mempunyai dampak yang baik pada Kepatuhan Formal Wajib Pajak.
 6. Itu dampak administrasi sanksi pada pembayar pajak kepatuhan adalah diringankan oleh pajak sosialisasi.
 Dengan koefisien beta standar sebesar 0,272, pengolahan data statistik hasil menunjukkan nilai t sebesar 2,927 dan probabilitas nilai $0,004 < \text{ signifikansi tingkat } \alpha = 5\% (0,05)$. Ini menunjukkan itu pajak sosialisasi keduanya memoderasi dan memperkuat itu dampak administrasi sanksi tentang wajib pajak formal kepatuhan. Oleh karena itu, kelima hipotesis — bahwa itu dampak administrasi sanksi pada pembayar pajak kepatuhan adalah dimoderasi oleh pajak sosialisasi — adalah didukung.
 7. Itu dampak administrasi sistem modernisasi pada resmi pembayar pajak kepatuhan adalah diringankan oleh pajak sosialisasi.
 Dengan koefisien beta standar -0,014, pengolahan data statistik hasil menunjukkan nilai t sebesar -0,215 dan probabilitas nilai $0,830 > \text{ signifikansi tingkat } \alpha = 5\% (0,05)$, menunjukkan itu pajak sosialisasi mengurangi dampak dari administrasi sistem tentang wajib pajak formal kepatuhan. keenam hipotesis, menurut ke yang pajak sosialisasi meringankan itu dampak administrasi sistem modernisasi tentang wajib pajak formal kepatuhan, adalah dengan demikian terbantah.
 8. Itu dampak e- filing pelaksanaan pada resmi pembayar pajak kepatuhan adalah dimoderasi oleh pajak sosialisasi.
 Dengan koefisien beta standar sebesar 0,446, pengolahan data statistik hasil menunjukkan nilai t sebesar 5,360 dan probabilitas nilai $0,000 < \text{ signifikansi tingkat } \alpha = 5\% (0,05)$. Ini menunjukkan itu pajak sosialisasi meningkat itu dampak e- filing pelaksanaan tentang wajib pajak formal kepatuhan. ketujuh hipotesis, menurut ke yang itu dampak dari implementasi elektronik pengarsipan tentang wajib pajak formal kepatuhan adalah dimoderasi oleh pajak sosialisasi, adalah dengan demikian diterima.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Signifikan	Keputusan
1	Pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak	0,009	Diterima
2	Dampak Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal	0.802	Ditolak
3	Efek Penggunaan E-Filing pada Kepatuhan Formal Wajib Pajak	0.000	Diterima
4	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak terhadap Sosialisasi Perpajakan	0.000	Diterima
5	Sosialisasi perpajakan mengurangi dampak sanksi administrasi terhadap kepatuhan pajak.	0,004	Diterima
6	Sosialisasi perpajakan memfasilitasi kepatuhan formal wajib pajak.	0.830	Ditolak
7	Sosialisasi perpajakan mengontrol penggunaan E-filing terhadap kepatuhan pajak formal.	0.000	Diterima

c. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara formal. Penelitian sebelumnya (Ainiyah & Febriani, 2023), (Faruq et al., 2024) ; (Ilanoputri, 2020) menemukan bahwa sanksi administratif memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Studi ini menunjukkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh dengan sanksi administratif yang tepat dan terorganisir. Ancaman sanksi berfungsi sebagai motivasi yang efektif dalam situasi ini. Ketika wajib pajak mengetahui tentang sanksi yang dapat dikenakan jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka akan lebih berhati-hati dan lebih cenderung mengikuti peraturan untuk menghindari denda atau biaya administratif lainnya. Sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga, sering kali menjadi pengingat yang ampuh bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Sanksi administratif yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak tidak ingin menghadapi konsekuensi keuangan yang dapat merugikannya. Sanksi administratif yang diterapkan secara konsisten dan relatif akan menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhannya. Pemahaman yang jelas tentang konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan akan mengurangi keraguan atau kebingungan yang mungkin timbul di kalangan pembayar pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara modernisasi sistem administrasi dengan kepatuhan wajib pajak formal. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh temuan penelitian sebelumnya (Amrulloh, 2022) , yang menyimpulkan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak formal memiliki dampak yang signifikan. Banyak faktor memengaruhi kepatuhan formal wajib pajak, bukan hanya modernisasi sistem administrasi. Beberapa faktor termasuk sanksi administratif, pengawasan yang ketat, dan kesadaran pajak yang rendah. Jika faktor-faktor tersebut lebih mempengaruhi wajib pajak daripada kemudahan yang diberikan oleh sistem administrasi modern, maka modernisasi mungkin tidak cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan mungkin tidak cukup efektif untuk mengubah mentalitas atau perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Kepatuhan pajak sering kali terkait dengan kesadaran dan sikap individu terhadap kewajiban perpajakan, yang tidak dapat diubah secara

permanen hanya dengan memperkenalkan sistem yang lebih canggih. Wajib pajak yang masih memiliki pola pikir menghindari pajak atau merasa tidak perlu mematuhi kewajiban perpajakan mungkin tidak akan terpengaruh oleh sistem yang lebih modern. Meskipun sistem administrasi yang lebih modern dapat memperkenalkan berbagai kemudahan, seperti sistem elektronik untuk pelaporan pajak, tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk menggunakannya dengan optimis. Wajib pajak yang kurang terampil atau tidak terbiasa dengan teknologi mungkin merasa kesulitan untuk menggunakan sistem baru, yang pada akhirnya tidak berdampak signifikan pada kepatuhan mereka. Oleh karena itu, bahkan jika modernisasi diterapkan, jika penggunaannya tidak didukung oleh pelatihan yang memadai, dampaknya terhadap kepatuhan mungkin terbatas. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, meskipun membawa manfaat dalam hal efisiensi dan kemudahan, memerlukan proses sosialisasi yang memadai bagi wajib pajak. Misalkan wajib pajak tidak menerima informasi yang cukup atau tidak memahami manfaat dan cara kerja sistem baru. Dalam hal itu, mereka mungkin tidak merasa termotivasi untuk memanfaatkan sistem untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, kegagalan dalam mensosialisasikan sistem modern dapat menjelaskan mengapa sistem tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib pajak formal memiliki efek positif dan signifikan. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan penelitian lain seperti Safitri & Silalahi (2020), Setiawan (2020), dan Ismail et al. (2018), yang menemukan bahwa penerapan sistem e-filing memungkinkan wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan mereka melalui e-filing. Dengan menggunakan e-filing, wajib pajak lebih mungkin menyelesaikan dan menyampaikan SPT sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Ini membantu kepatuhan formal wajib pajak.

Penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Temuan penelitian ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya (Hamida & Hasnawati, 2024), yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Penelitian mereka menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak formal. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak lebih cenderung memenuhi kewajiban formal mereka, seperti melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sosialisasi yang efektif juga dapat membantu wajib pajak lebih memahami pajak (Marfati et al., 2022). Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah kewajiban untuk mendukung kemajuan dan kepentingan sehari-hari, mereka mungkin lebih berkomitmen untuk memenuhi kewajiban formalnya. Dalam hal kepatuhan administratif, sosialisasi perpajakan dapat mengubah perilaku wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan dengan benar, seperti dengan memberikan informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari wajib pajak, dapat mengubah persepsi dan sikap mereka terhadap kewajiban perpajakannya, membuat mereka lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban formal mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi administratif terhadap kepatuhan formal wajib pajak dengan fungsi penguatan. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan yang dilakukan oleh (Herryanto & Toly, 2013) yang menemukan bahwa sosialisasi mampu memoderasi pengaruh sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak. Interaksi antara sanksi administratif dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif karena keduanya saling memperkuat. Ketika sosialisasi menjelaskan secara jelas potensi sanksi yang dihadapi wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka ancaman sanksi menjadi lebih nyata dan terasa. Wajib pajak yang memahami kemungkinan konsekuensinya (dari informasi yang diberikan melalui sosialisasi) akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan

demikian, sosialisasi meningkatkan pengaruh sanksi administratif dalam mendorong kepatuhan. Sosialisasi yang baik menjelaskan sanksi dan memperkenalkan prosedur perpajakan yang jelas dan transparan. Wajib pajak yang mengetahui secara pasti bagaimana sistem administrasi perpajakan bekerja, termasuk prosedur pemberian sanksi, akan merasa lebih adil dan nyaman dalam memenuhi kewajibannya. Keterbukaan ini akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak, yang akhirnya berdampak positif pada kepatuhannya. Banyak wajib pajak yang merasa tidak puas atau bahkan menentang penerapan sanksi apabila merasa tidak memiliki informasi yang cukup mengenai alasan atau dasar penerapan sanksi. Dengan sosialisasi yang baik, penolakan tersebut dapat dikurangi. Sosialisasi menjelaskan secara rinci mengapa sanksi perlu diterapkan dan bagaimana sanksi tersebut digunakan untuk meningkatkan keadilan dan kepatuhan seluruh wajib pajak. Hal ini membantu wajib pajak agar lebih mudah menerima dan menghindari sanksi dengan memenuhi kewajibannya secara formal dan tepat waktu. Sosialisasi juga dapat berdampak tidak hanya pada pemahaman teknis perpajakan tetapi juga kesadaran moral dan sosial wajib pajak. Apabila wajib pajak disosialisasikan mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, kepentingan bersama, dan akibat sosial dari ketidakpatuhan, maka mereka akan lebih termotivasi untuk patuh. Dengan mengombinasikan sosialisasi tersebut dengan informasi yang jelas mengenai sanksi administrasi, maka akan semakin memperkuat keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh sistem administrasi terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh temuan yang dilakukan oleh (Yoga & Dewi, 2022) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berperan memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memang menawarkan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki motivasi atau kesadaran pajak yang tinggi, modernisasi tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak sangat bergantung pada perubahan sikap dan mental wajib pajak terhadap pajak, yang tidak dapat diubah secara permanen hanya dengan menerapkan teknologi baru. Tanpa adanya insentif atau dorongan yang lebih substansial (misalnya sanksi yang tegas), sistem modern mungkin tidak cukup efektif untuk mendorong kepatuhan pajak (Atito & Masripah, 2024). Kepatuhan formal wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor selain modernisasi sistem dan sosialisasi perpajakan. Sanksi perpajakan, pengawasan yang ketat, dan kesadaran pajak yang rendah mungkin lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan. Misalnya, anggapan sanksi yang diterapkan dianggap tidak cukup tegas atau pengawasan tidak dilakukan secara efektif. Dalam hal tersebut, wajib pajak bisa saja tetap tidak patuh meskipun sistem administrasi telah dimodernisasi dan sosialisasi telah dilakukan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem yang dimodernisasi kurang transparan, sulit diakses, atau tidak memberikan manfaat yang jelas, maka meskipun telah dilakukan sosialisasi, mereka mungkin tidak berminat untuk beradaptasi dengan sistem tersebut. Ketidakpercayaan terhadap sistem yang baru dapat menghambat dampak positif terhadap kepatuhan. Dalam hal ini, meskipun modernisasi dilakukan dan sosialisasi dilakukan untuk mendukungnya, jika sistem tersebut tidak dipandang membantu atau efisien oleh wajib pajak, maka hasilnya tidak akan signifikan (Akbar, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan formal wajib pajak dengan fungsi penguatan. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan yang dilakukan oleh (Ismail et al., 2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Interaksi antara penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan memiliki

pengaruh yang signifikan karena kedua faktor tersebut saling memperkuat. Penerapan e-filing memberikan sarana yang lebih efisien dan mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, sosialisasi memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi wajib pajak untuk memahami cara menggunakan sistem secara efektif. Apabila sosialisasi dilakukan dengan baik, wajib pajak akan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan e-filing sehingga meningkatkan kepatuhan formal mereka. Tanpa sosialisasi yang memadai, meskipun e-filing tersedia, wajib pajak mungkin merasa bingung atau ragu untuk menggunakannya sehingga mengurangi dampak positif kepatuhan. Meskipun e-filing menawarkan kemudahan, keberhasilan penerapannya terutama bergantung pada seberapa baik wajib pajak memahami dan dapat memanfaatkan sistem ini. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan menjadi kunci agar wajib pajak mengetahui cara menggunakan e-filing dengan baik dan benar. Sosialisasi yang memadai dapat membantu wajib pajak memahami cara mengakses sistem, mengisi formulir dengan benar, dan menghindari kesalahan pelaporan. Selain itu, sosialisasi juga memberikan informasi mengenai manfaat dan keuntungan e-filing dibandingkan dengan cara manual. Dengan demikian, wajib pajak lebih termotivasi untuk menggunakannya dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi yang mencakup pemahaman kewajiban perpajakan, manfaat penggunaan e-filing, dan akibat ketidakpatuhan dapat memperkuat kesadaran wajib pajak untuk patuh. Dengan informasi yang tepat dan transparan mengenai cara kerja e-filing dan kontribusinya terhadap kepatuhan perpajakan, wajib pajak cenderung akan menggunakan sistem dengan tepat dan tepat waktu. Ketika wajib pajak mengetahui bahwa e-filing memudahkan mereka dan memberikan manfaat yang lebih signifikan, mereka cenderung akan mengikuti proses perpajakan yang ditetapkan. Penerapan e-filing memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya kapan saja dan di mana saja, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan dan menghindari antrian panjang di kantor pajak. Sosialisasi yang menunjukkan keuntungan tersebut dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya lebih cepat, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang merasa bahwa proses administrasi perpajakan lebih efisien dan mudah, akan cenderung lebih mematuhi kewajibannya.

4. KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Menurut hasil penelitian, tidak ada hubungan antara Modernisasi Sistem Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Formal. Pada saat survei dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia sedang menyelenggarakan edukasi perpajakan inti—sistem perpajakan yang menggabungkan seluruh prosedur bisnis utama administrasi perpajakan—yang akan dimulai pada Januari 2025. Peneliti sebagai petugas pajak mengamati bahwa wajib pajak terus mengubah dan mencoba sistem terbaru. Oleh karena itu, temuan penelitian ini relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Studi tersebut menemukan bahwa penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Penelitian juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki fungsi penguatan untuk mengurangi pengaruh sanksi administratif dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Namun, sosialisasi perpajakan tidak mengurangi pengaruh sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Saat penelitian ini dilakukan, Coretax telah diajarkan sebagai sistem administrasi pajak terpadu, atau sistem satu *gate*, di seluruh Indonesia. Itu akan dimulai pada tahun 2025. Peneliti sebagai petugas pajak berpendapat bahwa wajib pajak terus mencoba sistem terbaru ini dengan memberi tahu orang lain dan memberi tahu mereka tentang hal-hal terbaru.

Saran

Penelitian ini menemukan bahwa sanksi administrasi memiliki efek yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Indikator yang diperhatikan oleh sanksi administrasi termasuk keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak atau tunggakan pajak, sanksi administrasi dan pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengenakan sanksi perpajakan. Penggunaan e-filing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan formal terhadap wajib pajak. Aplikasi pajak inti akan digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan secara elektronik guna melakukan kajian lebih lanjut mengenai pajak inti sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak.

Kepatuhan formal wajib pajak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh sosialisasi perpajakan. Berdasarkan temuan tersebut, indikator-indikator sosialisasi perpajakan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: sosialisasi perpajakan perlu dilakukan secara berkala karena peraturan mengenai tata cara perpajakan dapat berubah; membantu dalam memberikan informasi kepada wajib pajak; harus mampu mengkomunikasikan seluruh informasi kepada Wajib Pajak secara langsung; dan harus mampu mengkomunikasikan segala informasi kepada wajib pajak melalui perantara pejabat pajak (fiscus).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengeahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5, 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Akbar, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1, 10–23. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.3>
- Amrulloh, A. (2022). Peningkatan Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional Melalui Implementasi Tax Amnesty. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(5), 201–206. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2199>
- Atito, M., & Masripah, M. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Dua. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 135–146. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1141>
- Dewi, S., & Merkusiwati, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1626. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30>
- Erica, D. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3, 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan

- Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Freddy, D. (2014). Pengaruh Pendidikan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 5 no 2, 49–60.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23*.
- Hamida, E., & Hasnawati. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Economic Reviews Journal*, 3. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>
- Hartana, I., & Merkusiwati, N. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1506. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p26>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 1(1).
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 143–156.
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(3), 440–446. www.ajhssr.com
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & Sudirwan S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11. <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/339/279>
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, Vol.5(No.3), 11–22. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/156>
- Malik, A., Asnawati, A., & Suprihatin, N. S. (2023). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Earnings Response Coefficient. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 2(1), 16–28. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i1.6444>
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13.

<http://dx.doi.org/10.33387/jtrans.v10i1.5876>

- Novita, R., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *JURNAL ECONOMINA*, 3, 254–263. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197>
- Octaviana, I., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6490>
- Rosyida, I. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/j-macc.v1i1.744>
- Safira Aksara, R. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK . *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2 SE-), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Safitri, D., & Silalahi, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian* (pp. 211–213).
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>